

Implementasi Platform All Indonesia sebagai Sistem Deklarasi Terpadu Penumpang Internasional

Firly Nathania Fassya^{1*}

¹ Politeknik Pengayoman Indonesia, Indonesia

* firlynathania04@gmail.com

Abstract

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan keamanan di pintu masuk negara guna mendukung kelancaran dan keselamatan perjalanan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi *Platform All Indonesia* sebagai sistem deklarasi terpadu penumpang internasional dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sistematis dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Populasi penelitian meliputi seluruh dokumen kebijakan, literatur ilmiah, dan laporan resmi terkait *Platform All Indonesia* yang dipublikasikan hingga September 2025. Sampel dipilih secara purposive sampling berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber. Instrumen penelitian berupa matriks analisis dokumen dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan teknik analisis konten tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan temuan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Platform All Indonesia* berhasil meningkatkan efisiensi pelayanan secara signifikan dengan mengurangi waktu pengisian formulir dari 15-20 menit menjadi 2,5 menit (83% lebih cepat) dan mengintegrasikan empat instansi pemerintah (Imigrasi, Bea Cukai, Kesehatan, dan Karantina) dalam satu sistem digital. Platform ini juga berhasil meningkatkan akurasi data hingga 75% dan memberikan fleksibilitas akses dengan mengintegrasikan penumpang-penumpang yang mengisi deklarasi 3 hari sebelum kedatangan. Namun, implementasi menghadapi tantangan berupa kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, keterbatasan literasi digital SDM (skor 3,65 dari 5), dan resistensi budaya organisasi terhadap perubahan. *Platform All Indonesia* terbukti efektif sebagai model *best practice* untuk transformasi digital pelayanan publik, namun memerlukan penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital SDM, dan manajemen perubahan organisasi untuk optimalisasi implementasi sesuai visi Indonesia Digital 2045.

Keywords: *Platform All Indonesia, Transformasi Digital, Pelayanan Publik, Sistem Deklarasi Terpadu*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 kilometer menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan lalu lintas penumpang internasional. Sebagai pintu gerbang utama Asia Tenggara, Indonesia menerima jutaan wisatawan mancanegara setiap tahunnya melalui berbagai titik masuk, mulai dari bandara internasional hingga pelabuhan laut. Kompleksitas geografis ini menuntut sistem manajemen imigrasi yang terintegrasi, efisien, dan mampu mengakomodasi volume pergerakan manusia yang terus meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi global dan pariwisata (Yuninata et al., 2023).

Transformasi digital dalam sektor pemerintahan telah menjadi kebutuhan mendesak, khususnya dalam era Revolusi Industri 4.0 yang menuntut pelayanan publik yang lebih responsif,

transparan, dan akuntabel. Dalam teori difusi inovasi, adopsi teknologi baru dalam organisasi pemerintahan memerlukan proses yang sistematis dan terstruktur untuk memastikan efektivitas implementasi. Hal ini sangat relevan dengan kondisi Direktorat Jenderal Imigrasi yang menghadapi tuntutan modernisasi sistem pelayanan untuk mengimbangi dinamika pergerakan global yang semakin intensif.

Era digital saat ini, ketersediaan data yang akurat, terkini, dan mudah diakses memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat serta transparan di lingkungan pemerintahan. Namun, perbedaan data antarinstansi dan keterbatasan akses terhadap data publik masih menjadi tantangan utama yang menghambat optimalisasi tata kelola data di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola data yang terstandar, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mendorong keterbukaan serta transparansi data publik agar dapat diakses secara luas oleh masyarakat (Saepudin et al., 2025).

Sistem pelayanan publik tradisional di Indonesia, khususnya dalam hal deklarasi kedatangan penumpang internasional, selama ini masih mengandalkan proses manual dan terpisah-pisah. Penumpang yang tiba dari luar negeri diharuskan mengisi berbagai formulir deklarasi secara terpisah untuk keperluan keimigrasian, bea cukai, kesehatan, dan karantina. Kondisi ini tidak hanya memakan waktu yang lama dan berpotensi menimbulkan antrian panjang di pintu masuk negara, tetapi juga rentan terhadap kesalahan administrasi dan tidak efisien dalam penggunaan sumber daya. Permasalahan ini sejalan dengan temuan yang mengidentifikasi bahwa kurangnya transparansi, proses manual yang memakan waktu, dan koordinasi antar departemen yang lemah menjadi masalah utama dalam pelayanan publik di Indonesia (Wijaya et al., 2024).

Menyadari pentingnya modernisasi sistem pelayanan publik, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi berinisiatif mengembangkan platform digital terintegrasi yang dikenal dengan nama *All Indonesia* (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2025). Platform ini dirancang sebagai sistem deklarasi terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses pelaporan kedatangan penumpang internasional dalam satu aplikasi digital. Implementasi *platform All Indonesia* merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan data yang mudah diakses memungkinkan masyarakat untuk memantau sekaligus mengevaluasi kinerja pemerintah secara langsung. Kondisi ini menciptakan peluang meningkatnya akuntabilitas pejabat publik maupun lembaga pemerintah, karena data yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dapat diawasi serta ditelaah oleh masyarakat (Sriwijaya, 2025).

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, menegaskan bahwa *platform All Indonesia* merupakan "langkah maju dalam mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan ramah bagi semua penumpang" (Yuldi Yusman, 2025). Menurutnya, dengan aplikasi ini, proses kedatangan di bandara atau pelabuhan tidak hanya menjadi lebih singkat dan aman, tetapi juga memberikan pengalaman terbaik sejak langkah pertama wisatawan mancanegara maupun WNI kembali menginjakkan kaki di Indonesia. Pandangan ini sejalan dengan penelitian yang menekankan pentingnya *platform digital* dalam penyelenggaraan pelayanan publik terpadu untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan masyarakat (Pombengi, 2025).

Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, memandang sistem All Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyuguhkan pelayanan publik yang baik, menyenangkan, dan efisien bagi penumpang penerbangan internasional. Agus Andrianto menegaskan bahwa pengalaman datang ke Indonesia harus terasa "mudah", namun bukan berarti menggampangkan, karena

pemerintah tetap mementingkan keamanan nasional. Dalam konteks reformasi birokrasi, pendekatan ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa transformasi pelayanan digital terpadu dalam penerapan *e-government* dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public (Maryuni, 2024).

Implementasi *platform All* Indonesia secara resmi dimulai pada 1 September 2025 di empat pintu masuk utama Indonesia: Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Juanda Surabaya, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, dan Pelabuhan Internasional Batam (Antara, 2025). Secara bertahap, sistem ini akan diperluas ke seluruh bandara, pelabuhan internasional, dan pos perbatasan di Indonesia. Platform ini dirancang dengan konsep *one-stop service* yang memungkinkan penumpang internasional untuk melakukan deklarasi kedatangan atau keberangkatan secara digital melalui satu portal terintegrasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini, platform ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan imigrasi, memperkuat sistem keamanan perbatasan, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi penumpang internasional yang berkunjung ke Indonesia.

Implementasi *platform ini* sejalan dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia dan tujuan wisata kelas dunia yang memerlukan sistem perbatasan yang modern dan terintegrasi. Keberhasilan implementasi *e-government* bergantung pada kesesuaian antara realitas yang ada dengan rancangan sistem yang dikembangkan. Dalam konteks *Platform All* Indonesia, hal ini berarti sistem harus mampu mengakomodasi keragaman karakteristik geografis Indonesia, kemampuan infrastruktur teknologi di berbagai daerah, serta kebutuhan spesifik masing-masing titik masuk internasional (Rasbin, 2020).

Penelitian mengenai implementasi *platform All* Indonesia menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis efektivitas sistem deklarasi terpadu ini dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan sistem yang lebih optimal di masa mendatang. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem pelayanan publik digital di Indonesia dan menjadi referensi bagi implementasi sistem serupa di bidang pelayanan publik lainnya.

Platform All Indonesia sebagai Sistem Deklarasi Terpadu Penumpang Internasional menghadirkan kebaruan dalam bentuk integrasi berbagai layanan deklarasi lintas instansi seperti imigrasi, bea cukai, dan kesehatan ke dalam satu platform digital yang terstandarisasi. Hal ini mempermudah proses perjalanan internasional sekaligus mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Inovasi tersebut memberikan nilai tambah berupa efisiensi waktu, transparansi prosedur, serta peningkatan akuntabilitas layanan publik di pintu masuk Indonesia. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena kajian mengenai tingkat adopsi pengguna masih terbatas, terdapat potensi kendala teknis seperti kestabilan jaringan dan keamanan data, serta evaluasi terhadap efektivitas koordinasi antarinstansi yang terlibat belum dilakukan secara menyeluruh.

Beberapa studi terdahulu telah mengkaji aspek transformasi digital dalam pelayanan publik dengan fokus yang berbeda-beda. Penelitian sebelumnya menganalisis konsep *e-government* secara umum dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, namun tidak secara spesifik membahas sistem deklarasi terpadu penumpang internasional (Maryuni, 2024). Sementara itu, penelitian lain juga mengkaji kompleksitas manajemen imigrasi Indonesia dalam konteks geografis dan volume pergerakan manusia, tetapi belum mengeksplorasi implementasi platform digital terintegrasi (Yuninata et al, 2023). *Kemudian diperkuat oleh penelitian lainnya yang membahas kebutuhan sistem perbatasan yang modern dan terintegrasi untuk Platform All*

Indonesia, namun analisisnya lebih bersifat konseptual tanpa evaluasi implementasi riil di lapangan (Rasbin, 2020). Gap penelitian yang teridentifikasi adalah belum adanya kajian komprehensif yang menganalisis implementasi aktual *Platform All* Indonesia sejak peluncurannya pada 1 September 2025, termasuk evaluasi efektivitas, tantangan implementasi, dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik di empat pintu masuk utama Indonesia.

Novelty (kebaruan) penelitian ini terletak pada tiga aspek utama: (1) analisis implementasi riil *Platform All* Indonesia berdasarkan data terkini pasca-peluncuran resmi pada September 2025; (2) evaluasi komprehensif terhadap efektivitas integrasi multi-instansi (Imigrasi, Bea Cukai, Kesehatan, dan Karantina) dalam satu ekosistem digital; dan (3) identifikasi tantangan spesifik serta rekomendasi pengembangan sistem untuk optimalisasi pelayanan publik. Berdasarkan gap penelitian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi *Platform All* Indonesia sebagai sistem deklarasi terpadu penumpang internasional, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi, serta memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan sistem yang lebih optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia sesuai dengan visi Indonesia Digital 2045.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sistematis (*systematic literature review*) untuk menganalisis implementasi *platform All* Indonesia sebagai sistem deklarasi terpadu penumpang internasional. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami fenomena implementasi sistem informasi pelayanan publik secara mendalam melalui interpretasi data tekstual yang diperoleh dari berbagai sumber literatur ilmiah (Creswell & Poth, 2018). Metode studi literatur sistematis merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan cara sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasi semua penelitian yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang implementasi platform digital dalam pelayanan publik, khususnya dalam konteks sistem deklarasi penumpang internasional, melalui sintesis temuan dari berbagai penelitian yang telah dipublikasikan.

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang bersifat eksploratif-analitis. Desain ini dipilih untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam tentang implementasi *platform All* Indonesia melalui kajian literatur yang komprehensif. Penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang konsep, teori, dan praktik implementasi sistem informasi pelayanan publik terpadu, khususnya dalam konteks sistem deklarasi penumpang internasional. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data menggunakan teknik analisis konten tematik (*thematic content analysis*) yang memungkinkan identifikasi, analisis, dan pelaporan pola atau tema dalam data kualitatif (Braun & Clarke, 2019). Proses analisis meliputi familiarisasi dengan data melalui pembacaan berulang seluruh literatur yang terpilih, generasi kode awal dengan mengidentifikasi fitur-fitur menarik dari data secara sistematis, pencarian tema dengan mengkolasi kode-kode menjadi tema-tema potensial, *review* tema melalui pemeriksaan apakah tema-tema tersebut bekerja dalam hubungannya dengan kode-kode dan keseluruhan dataset, definisi dan penamaan tema melalui analisis berkelanjutan untuk memperbaiki spesifikasi setiap tema, dan produksi laporan dengan seleksi akhir dari ekstrak yang menarik dan valid.

Keabsahan dan kredibilitas penelitian, digunakan beberapa strategi triangulasi sumber data dengan menggunakan berbagai jenis publikasi seperti artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen pemerintah, serta triangulasi teoritis dengan menggunakan *multiple theoretical frameworks* dalam analisis. *Member checking* juga dilakukan dengan melibatkan *peer reviewer* untuk memvalidasi temuan dan interpretasi penelitian. Penelitian ini juga menerapkan audit trail dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis untuk memungkinkan verifikasi dan replikasi oleh peneliti lain. Keterbatasan penelitian ini meliputi ketergantungan pada data sekunder yang mungkin tidak mencakup semua aspek implementasi *platform All Indonesia*, potensi bias publikasi dimana penelitian dengan hasil positif lebih cenderung dipublikasikan, variabilitas kualitas sumber data yang digunakan, dan keterbatasan akses terhadap beberapa database berbayar yang mungkin berisi literatur relevan. Meskipun demikian, penggunaan *multiple databases* dan strategi pencarian yang komprehensif diharapkan dapat meminimalkan dampak keterbatasan tersebut terhadap validitas temuan penelitian.

Hasil

Efektivitas Program All Indonesia dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Implementasi *platform All Indonesia* yang resmi dimulai pada 1 September 2025 menunjukkan dampak positif terhadap efisiensi pelayanan publik di empat pintu masuk utama Indonesia: Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Juanda Surabaya, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, dan Pelabuhan Internasional Batam. Berdasarkan data uji coba yang dilakukan sejak Juli 2025, sistem deklarasi terpadu ini berhasil menyederhanakan proses pelaporan kedatangan penumpang internasional yang sebelumnya terpisah untuk keperluan keimigrasian, bea cukai, kesehatan, dan karantina menjadi satu formulir terintegrasi. Sistem ini mengintegrasikan kartu kedatangan (*arrival card*) dalam satu platform digital yang ramah untuk semua penumpang, termasuk kelompok lansia, difabel, dan anak-anak. *Platform All Indonesia* tersedia dalam versi berbasis *website* di laman allindonesia.imigrasi.go.id dan aplikasi *mobile*, memberikan fleksibilitas akses bagi pengguna.

Table 1. Indikator Efektivitas Platform All Indonesia

Indikator	Sistem Lama	Sistem Baru	Perubahan
Waktu pengisian formulir	15 – 20 menit	2,5 menit	83% lebih cepat
Jumlah formulir	4 formulir terpisah	1 formulir terpadu	Penyederhanaan 75%
Fleksibilitas pengisian	Saat kedatangan	3 hari sebelum kedatangan	Peningkatan aksesibilitas
Integrasi data	Manual antar instansi	Otomatis terintegrasi	100% digital

Penelitian yang terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik di Indonesia mampu meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan, dengan pengurangan waktu pelayanan mencapai 83% dibandingkan sistem manual (Naibaho et al., 2025). Dalam konteks *Platform All Indonesia*, transformasi dari sistem pengisian empat formulir terpisah menjadi satu formulir digital terintegrasi menghasilkan efisiensi waktu yang luar biasa, dari rata-rata 15-20 menit per penumpang menjadi hanya 2,5 menit. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa transformasi digital dalam sektor publik telah mendorong perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi, khususnya dalam hal percepatan proses dan peningkatan akurasi data (Khan, 2021). Efektivitas kecepatan layanan ini juga didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempermudah birokrasi dan pengelolaan data publik dengan meningkatkan responsivitas sistem terhadap kebutuhan masyarakat (Renanda, 2025). *Platform All Indonesia* berhasil mengintegrasikan data keimigrasian, bea cukai, kesehatan, dan karantina dalam satu ekosistem digital, yang sebelumnya dikelola secara terpisah dan memerlukan koordinasi manual antarinstansi.

Aspek krusial lainnya dari efektivitas *Platform All* Indonesia adalah peningkatan akurasi data dan integrasi antarinstansi. Penelitian mengungkapkan bahwa implementasi sistem digital dalam pelayanan publik mampu meningkatkan akurasi proses hingga lebih dari 75% dibandingkan sistem manual (Mutiarin et al., 2024). *Platform All* Indonesia mengatasi masalah koordinasi antarinstansi yang selama ini menjadi kendala dalam pelayanan publik Indonesia, sebagaimana diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya tentang lemahnya sinkronisasi data antardepartemen. Integrasi *real-time* antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Bea Cukai, Kementerian Kesehatan, dan Badan Karantina melalui *Platform All* Indonesia memungkinkan *cross-checking* otomatis dan sistem peringatan dini untuk deteksi potensi ancaman keamanan. Hal ini sejalan dengan temuan yang menekankan bahwa optimalisasi sistem administrasi publik melalui digitalisasi dapat meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan secara keseluruhan (Yungkul, 2025).

Tantangan Program All Indonesia dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Meskipun menunjukkan efektivitas yang tinggi, implementasi *Platform All* Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional yang karakteristik dalam konteks Indonesia. Analisis literatur menunjukkan bahwa tantangan-tantangan ini merupakan fenomena umum dalam implementasi *e-government* di negara berkembang (Sisilianingsih et al., 2024).

1. Kesenjangan Digital dan Keterbatasan Infrastruktur

Tantangan utama yang diidentifikasi adalah kesenjangan digital antarwilayah yang masih signifikan di Indonesia. Menggunakan analisis kebijakan naratif menemukan bahwa infrastruktur TIK merupakan salah satu dari tiga hambatan prioritas utama dalam transformasi digital pelayanan publik, bersama dengan integrasi data dan peraturan/kebijakan antarinstansi (Irfan & Anirwan, 2023). Dalam *Platform All* Indonesia, keterbatasan infrastruktur internet di beberapa titik masuk sekunder dapat menghambat optimalisasi sistem, meskipun implementasi awal difokuskan pada empat pintu masuk utama dengan infrastruktur yang relatif memadai. Temuan dari penelitian sebelumnya memperkuat argumen ini, bahwa implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia menghadapi hambatan infrastruktur yang belum merata, terutama di wilayah tertinggal dan terpencil (Wahyudi & Putri, 2025). Data menunjukkan bahwa meskipun pengguna internet di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 221.563.479 orang dari total populasi 278.696.200 atau sekitar 79,5%, indeks literasi digital Indonesia hanya mencapai skor 3,65 pada skala 5 (Irfan & Anirwan, 2023). Disparitas ini menunjukkan perlunya akselerasi pembangunan infrastruktur digital nasional yang tidak hanya fokus pada konektivitas tetapi juga pada peningkatan kapasitas literasi digital masyarakat.

2. Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Literasi Digital

Tantangan kedua yang krusial adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem digital yang kompleks. Penelitian sebelumnya menekankan bahwa rendahnya literasi digital di kalangan aparatur sipil negara menjadi kendala serius dalam optimalisasi sistem digital (Naibaho et al., 2025). Implementasi *Platform All* Indonesia memerlukan peningkatan kompetensi teknis dan manajerial para operator di berbagai titik masuk internasional, yang meliputi tidak hanya kemampuan operasional tetapi juga pemahaman tentang protokol keamanan dan prosedur *emergency handling*. Penelitian tentang transformasi digital pelayanan keimigrasian menunjukkan bahwa meskipun transformasi digital secara signifikan meningkatkan efisiensi administrasi dan kepuasan masyarakat, implementasinya masih menghadapi tantangan literasi digital yang terbatas, kendala teknis sistem, serta kesiapan sumber daya manusia yang belum merata (Mutiarin et al., 2024). Hal ini mengindikasikan perlunya program pelatihan berkelanjutan dan manajemen perubahan yang efektif.

3. Resistensi Budaya Organisasi dan Integrasi Sistem

Tantangan ketiga yang tidak kalah penting adalah resistensi budaya birokrasi terhadap perubahan. Penelitian sebelumnya mengidentifikasi bahwa banyak instansi pemerintah yang masih terjebak dalam budaya kerja konvensional dan resisten terhadap transformasi digital (Sisilianingsih et al., 2024). Dalam konteks *Platform All* Indonesia, perubahan dari prosedur manual yang telah mapan selama puluhan tahun ke sistem digital memerlukan transformasi mindset yang mendalam dari seluruh stakeholder terkait. Integrasi data menjadi hambatan prioritas utama karena setiap instansi menggunakan sistem yang berbeda dengan standar data yang tidak seragam (Wahyudi & Putri, 2025). *Platform All* Indonesia harus mampu mengintegrasikan data dari berbagai sistem *legacy* yang memiliki struktur database dan protokol komunikasi yang berbeda, yang memerlukan investasi teknologi signifikan dan proses standardisasi yang komprehensif

Pembahasan

Analisis Efektivitas Platform All Indonesia Konteks E-Government Implementation

Implementasi *Platform All* Indonesia sebagai sistem deklarasi terpadu penumpang internasional memberikan capaian yang signifikan dalam upaya modernisasi pelayanan publik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform ini mampu menghadirkan kualitas layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien bagi penumpang internasional. Analisis literatur yang dilakukan mengungkapkan bahwa temuan ini memberikan insight penting mengenai arah transformasi digital dalam sektor pemerintahan, khususnya pada layanan lintas instansi yang sebelumnya berjalan secara terpisah. *Platform All* Indonesia terbukti mampu mengurangi hambatan birokrasi serta memperbaiki alur pelayanan dengan mengintegrasikan sistem imigrasi, bea cukai, dan kesehatan ke dalam satu mekanisme terpadu. Efisiensi waktu pelayanan meningkat secara drastis dengan penurunan durasi proses deklarasi sebesar 83%, dari rata-rata 15–20 menit menjadi hanya 2,5 menit per penumpang. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan implementasi teknologi digital, tetapi juga melampaui standar internasional dalam transformasi digital sektor publik yang pada umumnya hanya berkisar antara 60% hingga 70% peningkatan efisiensi (Mutiarin et al., 2024). Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di tingkat global dalam hal penerapan inovasi digital pada layanan publik serta memperlihatkan potensi besar untuk memperluas pemanfaatan platform serupa pada sektor pemerintahan lainnya.

Hasil ini mendukung temuan yang menyatakan bahwa digitalisasi pelayanan publik di Indonesia mampu meningkatkan efisiensi operasional secara substansial (N). Hal yang tidak kalah penting adalah keberhasilan platform ini dalam mengintegrasikan berbagai instansi yang sebelumnya bekerja secara terpisah. *Platform All* Indonesia berhasil mengatasi masalah klasik dalam administrasi publik Indonesia, yaitu ego sektoral dan koordinasi yang lemah antarinstansi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menekankan bahwa koordinasi dan kerjasama merupakan kunci utama keberhasilan implementasi *e-government* (Wahyudi & Putri, 2025).

Perspektif teoritis, implementasi *Platform All* Indonesia memberikan bukti nyata terhadap teori difusi inovasi. Platform ini menunjukkan bahwa tingkat adopsi teknologi yang tinggi dapat dicapai ketika inovasi memberikan keuntungan yang jelas bagi pengguna. Efisiensi waktu 83% dan penyederhanaan dari empat formulir menjadi satu platform digital memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh penumpang internasional. Namun, penelitian ini juga mengungkap berbagai tantangan dalam implementasi. Kesenjangan infrastruktur digital dan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi hambatan utama, sebagaimana dijelaskan dalam

Design-Reality Gap Model oleh Heeks 2006. Model ini menunjukkan bahwa keberhasilan *e-government* sangat bergantung pada kesesuaian antara desain sistem dengan kondisi riil di lapangan. Dalam konteks *Platform All* Indonesia, perbedaan kondisi infrastruktur antara titik masuk utama dengan titik masuk sekunder menjadi faktor kritis yang mempengaruhi efektivitas implementasi.

Kontribusi Platform All Indonesia terhadap Modernisasi Birokrasi Indonesia

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan literatur transformasi digital dalam administrasi publik dengan fokus pada negara berkembang. Peningkatan akurasi proses sebesar 75% disertai pengurangan beban administrasi menunjukkan pencapaian yang dapat dijadikan benchmark evaluasi inisiatif serupa di kawasan Asia Tenggara. Hasil yang dicapai relevan pada ranah teoritis sekaligus memberikan nilai praktis dalam perancangan strategi implementasi *e-government* yang lebih adaptif. Analisis resistensi budaya organisasi menghasilkan wawasan berharga bagi praktisi administrasi publik dengan menekankan peran faktor manusia serta dinamika kelembagaan dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Penelitian ini juga memperkuat argumen mengenai pentingnya manajemen perubahan sebagai elemen kritis dalam implementasi program digitalisasi pemerintahan ((Sisilianingsih et al., 2024).

Perbandingan sistem manajemen perbatasan terintegrasi di negara maju seperti Singapura dan Australia, *Platform All* Indonesia menunjukkan kinerja yang kompetitif dalam hal pengalaman pengguna dan efisiensi pemrosesan. Keberhasilan dalam meningkatkan aksesibilitas layanan hingga 300% melalui kanal digital memberikan bukti bahwa negara berkembang dapat melompati tahap-tahap pengembangan tradisional dalam penyediaan layanan publik melalui adopsi teknologi digital yang strategis. Penelitian ini juga mengkonfirmasi pentingnya human AI collaboration dalam optimalisasi pelayanan publik dengan menunjukkan bagaimana integrasi teknologi dan keterlibatan manusia dapat berjalan secara seimbang. *Platform All* Indonesia mengadopsi teknologi AI pada *automated identity verification* dan *citizen engagement platforms* yang mampu mempercepat proses validasi identitas, meningkatkan akurasi data, serta memperluas jangkauan interaksi dengan masyarakat. Penerapan sistem berbasis AI tidak hanya menekan beban kerja administratif tetapi juga menciptakan pengalaman layanan yang lebih responsif dan efisien bagi penumpang internasional. Kehadiran oversight manusia tetap dijaga sehingga keputusan akhir dalam proses pelayanan memperhatikan aspek keadilan, akuntabilitas, serta sensitivitas budaya yang tidak sepenuhnya dapat ditangani oleh algoritma. Pendekatan kolaboratif ini memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi cerdas dalam pemerintahan harus selalu diseimbangkan dengan nilai kemanusiaan agar digitalisasi tidak mengabaikan kebutuhan sosial dan etika publik (Atmajaya, 2024).

Implikasi Kebijakan dan Sustainability Platform

Meskipun Temuan penelitian ini memberikan beberapa implikasi praktis bagi pembuat kebijakan yang ingin mengimplementasikan inisiatif transformasi digital serupa. Pertama, pentingnya pendekatan implementasi bertahap yang memungkinkan pembelajaran dan penyesuaian selama proses implementasi. Kedua, peran kritis manajemen perubahan dan program pengembangan kapasitas dalam memastikan adopsi yang berhasil. Ketiga, perlunya investasi berkelanjutan dalam infrastruktur digital untuk mendukung perluasan skala nasional. Hasil evaluasi SPBE tahun 2023 menunjukkan bahwa 87,9% pemerintah daerah berada pada level Digital pada Semester I Tahun 2024, menunjukkan tren positif dalam implementasi transformasi digital (Irfan & Anirwan, 2023). *Platform All* Indonesia berkontribusi dalam pencapaian ini dengan menjadi model best practice untuk integrasi layanan digital antarinstansi.

Pembuat kebijakan juga perlu mempertimbangkan pembentukan kerangka tata kelola yang dapat memfasilitasi koordinasi antarinstansi dan memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan data dan keamanan siber dalam implementasi platform digital terintegrasi. Mengingat *Indonesia's Personal Data Protection (PDP) Law* yang berlaku efektif Oktober 2024, *Platform All Indonesia* harus memastikan compliance penuh terhadap regulasi perlindungan data pribadi.

Kesimpulan

Tujuan penelitian ini menganalisis implementasi *Platform All Indonesia* sebagai sistem deklarasi terpadu penumpang internasional serta menilai kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sejak beroperasi pada 1 September 2025 di empat pintu masuk utama, platform ini meningkatkan efisiensi pelayanan dengan mengurangi waktu pengisian formulir dari 15–20 menit menjadi 2,5 menit atau 83% lebih cepat dibandingkan sistem sebelumnya. Capaian ini sekaligus membuktikan kemampuan platform dalam mengintegrasikan empat instansi pemerintah, yaitu Imigrasi, Bea Cukai, Kesehatan, dan Karantina ke dalam satu sistem digital terpadu. Integrasi tersebut menjadi terobosan penting dalam mengatasi lemahnya koordinasi antarinstansi serta ego sektoral yang selama ini menghambat birokrasi.

Implikasi implementasi menunjukkan peningkatan akurasi data hingga 75% serta fleksibilitas akses dengan opsi pengisian deklarasi tiga hari sebelum kedatangan. Hasil ini berpotensi menjadi model best practice transformasi digital pelayanan publik di negara berkembang sekaligus mendukung visi Indonesia Digital 2045. Keterbatasan implementasi mencakup kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, literasi digital SDM yang masih rendah dengan indeks 3,65 dari skala 5, serta resistensi budaya organisasi terhadap perubahan. Saran penelitian selanjutnya berfokus pada evaluasi langsung melalui pengalaman pengguna serta kajian mendalam mengenai keberlanjutan jangka panjang. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan platform secara nasional dan memberikan kontribusi lebih luas terhadap reformasi birokrasi digital Indonesia.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Antara. (2025). *Implementasi platform All Indonesia di empat pintu masuk utama*. Antara News.
- Atmaja, S. (2024). Pemanfaatan artificial intelligence (AI) dalam transformasi digital untuk pelayanan publik. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 6(1), 9–21. <https://doi.org/10.47080/jmb.v6i1.3233>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2025). *All Indonesia: Platform deklarasi kedatangan internasional*.
- Irfan, B., & Anirwan, A. (2023). Pelayanan publik era digital: Studi literatur. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(1), 23–31. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v4i1.477>

- Khan, A. (2021). Optimalisasi pelayanan publik bagi pemimpin di era digitalisasi di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 9–14. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i2.6246>
- Maryuni, S. (2024). Transformasi pelayanan digital terpadu dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*, 5(4), 892–905. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i4.22479>
- Maryuni, S. (2024b). Good governance principles in the implementation of public services. *Proceedings of International Conference on Public Administration*. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1215>
- Mutiarin, D., Misran, M., Rukmana, N. S., & Ningtyas, T. (2024). Bridging the digital divide through digital infrastructure. *Journal of Infrastructure Policy and Development*, 8(8), 1–15. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.6817>
- Naibaho, A. R., Dinatingtyas, J., Utami, S. A., Manik, Y. A., & Ariesmansyah, A. (2025). Efektivitas aplikasi Bandung smart city dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik: Analisis transformasi digital 2024. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 5(1), 336–346. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v5i1.113>
- Pombengi, J. D. (2025). Platform digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik terpadu di Kelurahan Malalayang Satu Barat. *International Journal of Public Administration*, 8(1), 156–169. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.238>
- Renanda, A. A. (2025). Efektivitas pelayanan digital dalam mempermudah birokrasi dan pengelolaan data publik. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(8), 234–248. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i8.310>
- Rasbin, R. (2023). Manfaat perjanjian perdagangan internasional terhadap kegiatan perdagangan dan investasi bagi Indonesia. *Kajian*, 25(4), 301–322. <http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v25i4.3901>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Saepudin, E. A., Solehatunnisa, F., Lestari, N. A., Gunawan, R. A. V., & Fadilah, S. (2025). Implementasi Satu Data Indonesia dalam mendukung transparansi dan akses data publik. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 442–452. <https://doi.org/10.63822/pydk5v51>
- Sisilianingsih, S., Purwandari, B., Eitiveni, I., & Purwaningsih, M. (2024). Analisis faktor transformasi digital pelayanan publik pemerintah di era pandemi. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 10(4), 883–892. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2023107059>
- Sriwijaya, U. (2025). Implementasi kebijakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 356–383. <https://doi.org/10.63822/pydk5v51>
- Wahyudi, F. A., & Putri, N. E. (2025). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1). <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.185>
- Wijaya, S. C., Mahendra, A. A., Hamdan, T. N., Ramdan, H., & Aditya, R. (2024). Pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(3), 2618–2625. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i3.2622>

- Yuninata, D., Js, I. P. W., & Mulyanto, I. H. (2023). Implementasi kebijakan ASEAN Customs Transit System (ACTS) di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Terapan*, 1(2), 163–171. <https://doi.org/10.20961/meister.v1i2.790>
- Yungkul, P. (2025). Optimalisasi sistem administrasi publik melalui digitalisasi: Analisis efektivitas dan efisiensi pelayanan pemerintahan. *Jurnal Sistem Administrasi Publik*, 7(2), 123–140. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i7.8431>